

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Misbahul Munir¹⁾, Nera Marinda Mahdar²⁾

¹⁾Institute Keuangan Perbankan dan Informatika Asia
Email: cah.tikusan@gmail.com

²⁾Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kavling 22, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13210
Email: nera.marinda@kalbis.ac.id

Abstract: This research is purposed to examine the effect of economic growth, local own revenue (PAD), and intergovernmental transfer (DAU) to capital expenditure. This is replica research that used associative causal reseach design with a focus of research is the Regional Finance Budget Realization Report particularly variable of local own revenue (PAD), and intergovernmental transfer (DAU) and the number of constant price GDP by 2000 from the year 2007 to 2011 in the district/city of Central Java Province. To described the effect of economic growth, local own revenue (PAD), and intergovernmental transfer (DAU) as the independent variable and the capital expenditure as the dependent variable, this research used analysis of multiple liniear regression, test of coefficient of determination, t test, and F significance test. The result of this research showed partially only variable of intergovernmental transfer (DAU) that had significant impact to the capital expenditure. While, economic growth and local own revenue (PAD) had unsignificantly impact to the capital expenditure. Simultaneously economic growth, local own revenue (PAD), and intergovernmental transfer (DAU) had significant impact to the capital expenditure.

Keywords: economic growth, local own revenue, intergovernmental transfer and capital expenditure

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi Belanja Modal. Penelitian ini adalah penelitian replikasi dan menggunakan pendekatan hubungan assosiatif kausal dengan fokus penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Daerah khususnya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta jumlah PDRB menurut harga konstan Tahun 2000. Objek penelitian ini adalah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dengan periode penelitian selama tahun 2007-2011. Untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen dan alokasi Belanja Modal sebagai variabel dependen, Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t dan uji signifikansi F. Hasil pengolahan data secara parsial menunjukkan hanya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal

I. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah saat ini memiliki kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola semua potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Kewenangan ini diberikan kepada pemerintah daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun

1999 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Kewenangan ini diberikan kepada pemerintah

daerah dengan harapan agar pengelolaan semua potensi daerah dapat dilakukan secara proporsional, transparan dan penuh tanggung jawab.

Dokumen rencana keuangan daerah sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada publik sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang memiliki posisi strategis dalam upaya pengembangan potensi semua sumber daya yang ada di daerah (Nurdin, 2011: 2). Pemerintah daerah memiliki APBD sendiri-sendiri baik itu pemerintah propinsi, pemerintah kota, maupun pemerintah kabupaten. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah setelah melalui proses yang cukup panjang antara dua lembaga yaitu eksekutif dan legislatif. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 penyusunan APBD dimulai dengan nota kesepahaman tentang kebijakan umum APBD dan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) sebagai dasar untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Lembaga eksekutif berdasarkan kebijakan umum APBD dan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD hingga rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) yang kemudian dibahas secara bersama-sama dengan lembaga legislatif untuk menetapkan peraturan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 salah satu fungsi dari APBD adalah fungsi distribusi. APBD yang telah disepakati harus lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang dapat dinikmati oleh sektor publik. Kebijakan yang terkait dengan anggaran sektor publik harus dibuat berdasarkan asas keadilan dimana anggaran tersebut menyentuh semua lapisan masyarakat secara merata. Anggaran sektor publik juga harus memperhatikan semua potensi dan kekayaan daerah tersebut agar mampu dioptimalkan dalam meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Keberhasilan anggaran sektor publik tercermin dari tingkat kedalaman suatu daerah dalam menerjemahkan semua potensi dan kebutuhan daerah tersebut dalam satu tahun anggaran.

Fungsi lain dari APBD adalah fungsi alokasi yakni penyusunan APBD harus menghasilkan *output* yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran dan prioritas yang telah ditentukan (Stine, 1994: 807). APBD yang disusun sebaiknya diarahkan untuk kegiatan yang dapat menumbuhkan

banyak lapangan kerja sehingga secara bersama-sama dapat mengurangi angka pengangguran serta menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan komponen penting yang menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya. Upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran pendapatannya dan mengefektifkan pengelolaan anggaran belanja tidak akan memberikan dampak yang signifikan tanpa diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara teori dan prinsip dalam pendekatan ilmu ekonomi, APBD merupakan *public expenditure management* pada tingkat lokal, yang akan berdampak pada produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan perkapita (Fozzard, 2001: 5). Semakin baik APBD yang dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maka semakin besar pula produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan perkapita masyarakat daerah tersebut sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif.

Sebagai satu sumber dari pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2006). Dalam hal ini setiap daerah memiliki karakteristik sendiri-sendiri sehingga pemerintah daerah tentunya lebih memahami potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. PAD antara daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda, semakin rendah PAD suatu daerah maka pemerintah daerah harus lebih selektif dan efisien dalam melakukan belanja. Apabila terjadi kesalahan dalam melakukan belanja maka dapat mengakibatkan pencapaian pembangunan yang rendah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pemerintah daerah juga memperoleh sumber pendapatan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan atas konsep kesenjangan atau celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan alokasi dana yang dibutuhkan daerah untuk melaksanakan fungsi dasar sebagai penyedia layanan umum bagi masyarakat, sedangkan kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil (Sidik, 2002: 98). Penerimaan dari DAU dalam beberapa tahun terakhir masih sangat dominan dalam porsi penerimaan daerah dan melebihi sumber

penerimaan yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006: 9). Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat masih tinggi sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit dari masing-masing pemerintah daerah untuk segera mengatasi persoalan mendasar ini.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sering mengalokasikan dana dalam jumlah yang relatif besar untuk membiayai belanja rutin sehingga pelayanan publik menjadi terganggu karena alokasi yang digunakan untuk program peningkatan kualitas pelayanan publik sangat minim. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2007-2010), telah terjadi kenaikan tren yang cukup signifikan terhadap proporsi belanja pegawai dalam agregat APBD berturut-turut dari tahun 2007 sebesar 39%, tahun 2008 sebesar 42%, tahun 2009 sebesar 46% dan tahun 2010 sebesar 51%. Pada tahun 2010 secara presentase belanja pegawai sangat dominan di 4 wilayah yaitu Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara sebesar 40-60%. Di Propinsi Riau yang terkenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam, pada tahun 2011 hampir 80% APBD bersumber dari Dana Perimbangan Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan PAD hanya sebesar kurang lebih 15% dari total APBD, bahkan 5 dari 12 kabupaten/kota di Propinsi Riau PAD-nya dibawah 5% (Kabupaten Meranti, Rohul, Pelalwan, Kuansing dan Inhu). Belanja Modal sebagai sarana meningkatkan kualitas pelayanan publik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, dimana alokasi Belanja Modal minimal 29 persen dari total Belanja Daerah, 6 dari 12 kabupaten/kota yaitu Pekanbaru, Dumai, Inhu, Kampar Kuansing dan Rokan Hulu justru mengalokasikan Belanja Modalnya antara 17-29% dari Total APBD. Dengan kondisi seperti ini maka akan sulit bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Saragih (2003:81) menyatakan bahwa pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan anggaran belanjanya untuk hal-hal yang produktif dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sependapat dengan hal tersebut, Halim (2001) dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007: 5) menyatakan pemerintah daerah, khususnya yang memiliki kapasitas fiskal rendah, seharusnya mulai mengubah komposisi belanja pada neraca anggaran untuk dialokasikan dalam bentuk anggaran Belanja Modal yang dapat menambah jumlah aset

tetap. Kebutuhan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah erat kaitannya dengan jumlah sarana dan prasana yang akan digunakan untuk mendukung kelancaran penyediaan layanan publik yang memadai dan mendukung jalannya roda pemerintahan. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Dalam era otonomi daerah yang semakin berkembang, pemerintah daerah harus semakin kreatif dan inovatif untuk menggali setiap potensi terbaik yang ada di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu tahun anggaran. Kewenangan yang semakin besar ini juga dibarengi dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas anggaran sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Setiap tindak penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah akan lebih mudah terindikasi karena sistem anggaran sekarang jauh lebih mudah diakses informasinya. Ketidakkampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya secara efektif dan efisien bukan hanya akan menghambat penyediaan layanan dasar publik dan mengganggu jalannya pemerintahan secara umum tetapi juga akan membuat daerah tersebut semakin jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain.

Sejak era otonomi daerah diberlakukan, semakin banyak kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk mencakup pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Pemerintah daerah harus berusaha untuk lebih mandiri dengan cara memikirkan solusi atas permasalahan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Alternatif yang bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan industri kreatif yang masih memiliki pangsa pasar menjanjikan karena belum banyak yang bergerak di bidang ini. Pemerintah daerah juga memaksimalkan lahan yang dimiliki untuk dikembangkan sebagai sentra industri baru dengan didukung kemudahan birokrasi agar investor tertarik menanamkan modalnya di daerah tersebut. Pada dasarnya otonomi daerah yang sedang dijalankan adalah untuk kebaikan pemerintah daerah agar dapat fokus mengelola apa yang tersedia di daerahnya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kesejahteraan masyarakat daerah tersebut bisa meningkat.

II. METODE PENELITIAN

A. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah selama periode 2007-2011 sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota dengan jumlah interval selama 4 tahun sehingga diperoleh jumlah keseluruhan populasi sebanyak 140 populasi.

B. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu agar mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa kriteria dan pertimbangan yang dijadikan dasar penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Tersedia data PDRB atas harga konstan Tahun 2000 untuk setiap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah; (2) Tersedia data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah periode 2007-2011; dan (3) Semua data berada dalam *range* $\mu - 3\sigma \leq d \leq \mu + 3\sigma$. Terhadap data yang bersifat *outlier*, yang memiliki nilai lebih kecil dari $\mu - 3\sigma$ atau lebih besar dari $\mu + 3\sigma$, maka data tersebut dikeluarkan dari sampel.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber utama tetapi dari sumber lain yang berupa literatur-literatur yang dapat mendukung penelitian. Data tersebut antara lain: (1) Data PDRB atas harga konstan Tahun 2000 untuk setiap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah yang diperoleh di <http://www.bps.go.id>; dan (2) Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal dari laporan Realisasi APBD di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah periode 2007-2011 yang diperoleh di <http://www.djpk.depkeu.go.id>.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) Studi Observasi, yaitu dengan mencatat besarnya PDRB atas harga konstan 2000 dan besarnya PAD, DAU serta Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD yang diunduh dari <http://www.djpk.depkeu.go.id> untuk tahun 2007-2011; dan (2) Studi pustaka, yaitu sumber bahan

kajian yang dikemukakan oleh orang atau pihak yang hadir pada saat terjadinya peristiwa/tidak mengalami langsung peristiwa itu sendiri, seperti buku-buku teks.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun sehingga untuk mengetahuinya harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006: 9). Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 2 sisi yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan menggambarkan komponen-komponen makro ekonomi seperti konsumsi, ekspor-impor serta investasi, sedangkan sisi penawaran memperhitungkan nilai tambah setiap sektor produk nasional.

Boediono (1994) dalam Tarigan (2006:46) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Penekanan di sini adalah pada proses karena mengandung unsur perubahan dan indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama. Pertumbuhan ekonomi ke arah nilai positif akan dapat meningkatkan sumber pendapatan negara sehingga merangsang pemerintah mengalokasikan dana untuk kesehatan dan pendidikan (Quang Dao, 2012:81).

Menurut model ekonomi dari teori neo-klasik yang dikembangkan oleh Solow (1956) perkembangan ekonomi itu bersifat terbuka. Hal ini dapat terlihat dengan diabaikannya beberapa aspek penting dari makro ekonomi, seperti pertumbuhan jumlah populasi penduduk, masalah dalam ketenaga-kerjaan, serta hal lain yang terkait dengan investasi dan tabungan. Asumsi-asumsi penting yang mendasari terbentuknya model ekonomi dari teori Solow antara lain: tingkat depresiasi dianggap konstan, tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal, tidak ada sektor pemerintah, tingkat pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) dianggap konstan serta seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk sama dengan jumlah pekerja (Pratama dan Manurung, 2008: 141)

Secara konvensional pengukuran pertumbuhan ekonomi dihitung dari penambahan presentase dari produk domestik bruto (PDB). PDB mengukur pengeluaran total suatu perekonomian terhadap barang dan jasa yang diproduksi pada periode tertentu serta pendapatan total secara lebih rinci yang diterima

dari seluruh produksi barang dan jasa tersebut, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu (Mankiw, 2001:126). Untuk mengetahui PDB suatu daerah atau wilayah tertentu digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah umumnya digunakan data PDRB riil atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dengan mengabaikan inflasi pada barang dan jasa tersebut. Tujuan dari PDRB atas dasar harga konstan adalah untuk mengetahui perubahan kuantitas produksi pada periode tertentu sehingga dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

B. Anggaran Daerah Sektor Publik

Menurut Raghunandan (2012:110), anggaran merupakan bagian dari pengendalian manajemen yang dirancang untuk mempromosikan penggunaan sumber daya yang efisien dan memberikan dukungan untuk fungsi-fungsi penting lainnya. Anggaran ini erat kaitannya dengan rencana kegiatan suatu organisasi yang diwujudkan dalam satuan moneter untuk rencana pendapatan maupun belanja. Untuk intitusi pemerintahan daerah, anggaran yang digunakan lebih difokuskan untuk kepentingan publik di daerah sehingga sering juga disebut dengan anggaran daerah sektor publik.

Pengertian anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2002:62) yaitu: "suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter". Anggaran daerah sektor publik merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk memberikan arah pembangunan sosial ekonomi agar arah pembangunan sejalan dengan tujuan dari pemerintah. Sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat tidak terbatas. Anggaran perlu disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien

C. Proses Penyusunan Anggaran Di Indonesia

Hampir setiap organisasi terlepas dari bidang, ukuran dan kompleksitas usahanya sangat bergantung

pada anggaran dan sistemnya. Keberhasilan dan faktor penting anggaran digunakan untuk mengidentifikasi pencapaian tujuan strategik organisasi, tanggung jawab serta segala konsekuensi yang melekat didalamnya (Drake dan Fabozzi, 2010 dalam Raghunandan (2012:110)). Anggaran yang disepakati telah melalui proses penganggaran yang meliputi pengaturan tujuan dan sasaran strategis serta pengembangan akun pendapatan, biaya produksi, arus kas dan faktor penting lainnya. Proses penganggaran ini berfungsi untuk menerjemahkan rencana keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Proses penganggaran memiliki beberapa tahapan sebelum disahkan sebagai anggaran yang disepakati.

D. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002: 132): Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Hal senada dikemukakan oleh Halim (2008:96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah ini dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

E. Dana Alokasi Umum

Di Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Transfer dalam bentuk DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan ekonomi daerah (Prakosa, 2004)

F. Statistik Deskriptif

Hasil analisa Deskripsi Objek Penelitian dapat dilihat dari statistik deskriptif atas sampel yang telah dipilih. Pembuatan Statistik deskriptif ini bertujuan

untuk memudahkan orang dalam membaca data dan memahami maksudnya sehingga tidak memberikan penafsiran ganda.

Dari data penelitian yang diperoleh dapat terlihat bahwa jumlah data awal (N) sebanyak 140 (35 Kabupaten selama 4 tahun). Jumlah ini merupakan total Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Pada perkembangan selanjutnya diketahui ada 7 Kabupaten/kota yang memiliki data yang sifatnya ekstrim (*outlier*) yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Jepara, Kota Surakarta dan Kota Semarang sehingga data tersebut menyebabkan distribusi data menjadi tidak normal dan dapat mengakibatkan penelitian menjadi terganggu. Oleh karena itu, ketujuh data tersebut dikeluarkan dari objek penelitian.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Suliyanto (2011:79) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk menormalkan data adalah dengan cara metode *trimming*. Metode *trimming* adalah membuang (memangkas) observasi yang bersifat outlier, yaitu yang nilainya lebih kecil dari $\mu - 3\sigma$ atau lebih besar dari $\mu + 3\sigma$. Metode ini akan mengecilkan sampelnya atau dengan kata lain menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab distribusi data menjadi tidak normal sehingga dengan membuang data tersebut maka data bisa mendekati nilai rata-ratanya. Setelah menggunakan metode *trimming* diketahui jumlah data sekarang menjadi 112 sampel (28 Kabupaten selama 4 tahun) dan jumlah tersebut yang akan menjadi objek penelitian untuk dibahas lebih lanjut.

Berikut ini merupakan output SPSS dari hasil deskriptif statistik data di atas:

Tabel 1 Hasil statistik deskriptif rata-rata PDRB atas harga konstan 2000, PAD, DAU dan belanja modal kota dan Kabupaten Jawa Tengah Tahun 2007-2011

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	28	874.153,14	12.376.006,64	387.0351,8739	2.690.029,3770
PAD	28	39.785,05	136.271,56	72.234,7421	2.2046,2631
DAU	28	235.082,42	793.709,51	514.912,1696	142.090,9141
BM	28	73.823,99	228.967,62	123.614,7361	34.009,6496
Valid N (listwise)	28				

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terkecil di Kota Salatiga yaitu sebesar 874.154,14 sedangkan rata-rata PDRB terbesar ada di Kabupaten Cilacap sebesar 12.376.006,64. Rata-rata keseluruhan dari PDRB di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah yang terdapat pada tabel diatas adalah sebesar 3.870.351,87 dengan standar deviasi sebesar 2.690.029,38.

Variabel PAD menampilkan hasil yang berbeda, dimana rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkecil terdapat di Kota Pekalongan sebesar 39.785,05. Rata-rata PAD terbesar pada penelitian ini terdapat di Kabupaten Banyumas sebesar 136.271,56 dan untuk rata-rata keseluruhan PAD adalah sebesar 72.234,74 dengan standar deviasi 22.046,26.

Rata-rata Dana Alokasi Umum berdasarkan hasil statistik deskriptif diatas menunjukkan kondisi yang menyerupai dengan hasil statistik deskriptif rata-rata Produk Domestik Regional Bruto. Kota Salatiga memiliki rata-rata DAU terkecil dengan jumlah 235.082,42 sedangkan rata-rata DAU terbesar terdapat di Kabupaten Cilacap dengan jumlah sebesar 793.709,51. Adapun rata-rata keseluruhan dari DAU berdasarkan Tabel 4.2 diketahui sebesar 514.912,17 dengan standar deviasi sebesar 142.090,91.

Pada variabel Belanja Modal, rata-rata terkecil selama tahun 2007-2011 adalah Kota Magelang dengan nilai sebesar 73.823,99. Untuk rata-rata Belanja Modal Kabupaten Cilacap memiliki nilai terbesar 228.967,62. Rata-rata keseluruhan dari Belanja Modal di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah yang terdapat pada tabel diatas sebesar 123.614,74 dengan standar deviasi 34.009,65.

G. Analisis Regresi

Analisis regresi memiliki tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui atau nilai rata-rata populasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*) karena memiliki lebih dari satu variabel bebas. Analisis ini dilakukan untuk membuktikan apakah ada pengaruh antara variabel bebas yaitu PDRB (X_1), PAD (X_2), dan DAU (X_3) terhadap variabel terikat yaitu BM (Y). Hasil *output* SPSS pada analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil analisis regresi linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.139	.271		.513	.609
PDRB	-7.907	5.310	-.123	-1.489	.139
PAD	.575	.306	.157	1.875	.063
DAU	4.076	.761	.448	5.357	.000

Berdasarkan hasil pengolahan diatas, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah:

$$Y = 0,139 - 7,907X_1 + 0,575X_2 + 4,076X_3 + e$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut memberikan gambaran bahwa: Konstanta (a) memiliki nilai sebesar 0,139 yang artinya jika variabel dependen (variabel X_1 , X_2 dan X_3) adalah 0 atau tidak ada maka jumlah Belanja Modal sebesar 0,139 dan nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi linear atau tergabung dalam variabel pengganggu (e).

Variabel PDRB (X_1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -7,907 yang berarti PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Modal yaitu jika terjadi peningkatan PDRB maka akan menurunkan Belanja Modal dan sebaliknya jika terjadi penurunan PDRB maka akan terjadi peningkatan Belanja Modal dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

Variabel PAD (X_2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,575 yang berarti PAD memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), yaitu jika terjadi peningkatan kuantitas pada segi PAD maka akan meningkatkan Belanja Modal dan sebaliknya jika terjadi penurunan pada PAD maka akan terjadi penurunan Belanja Modal dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

Variabel DAU (X_3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 4,076 yang berarti DAU memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), yaitu jika terjadi peningkatan kuantitas pada segi DAU maka akan meningkatkan Belanja Modal dan sebaliknya jika terjadi penurunan pada DAU maka akan terjadi penurunan Belanja Modal dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,139 yang lebih besar dari probabilitas penelitian ini sebesar 0,05; (2) Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,063 yang lebih besar dari probabilitas penelitian ini sebesar 0,05; (3) Secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan

dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari probabilitas penelitian ini sebesar 0,05; dan (4) Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari probabilitas penelitian ini sebesar 0,05.

V. DAFTAR RUJUKAN

- Darwanto, Y. Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali. Makassar: *Simposium Nasional Akuntansi X (ASPP-04)* , 26-28 Juli 2007.
- Pamela, D. P. & Frank, F. J. (2010), *The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business Finance, and Portfolio Management*. New Jersey : John Wiley and Sons Inc.
- Fozzard, A. (2001). The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, *Overseas Development Institute (ODI)*: Working paper 147.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hari, P. A. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus Kabupaten/Kota se Jawa-Bali, Padang: *Simposium Nasional Akuntansi IX (K-ASPP 03)*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013). *Data Keuangan Daerah*, (online), (<http://djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah>, diakses 10 Mei 2013).
- Gregory, M. (2001). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi.
- Mulawati, N. H. (tanpa tahun). Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam APBD Kota Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan Di Indonesia.
- Prakosa, K. B. (2004). Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI vol. 8 No. 2*: 101-118.

- Quang, D. M. (2012). Government expenditure and growth in developing countries. *Progress in development studies*, Vol XII (1): 77-82.
- Raghunandan et al. (2012). Examining the Behavioural Aspects of Budgeting with particular emphasis on Public Sector/Service Budgets. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 14: 110-117.
- Rahardja, P. & Manurung, M. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Edisi Ketiga*. Jakarta: FEUI.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sidik et al. (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Stine, W. F. (1994). Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania Country Government in an era of Retrenchment. *National Tax Journal*, LXVII (4): 799-816.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: CV Andi Offset.
- Tarigan, R. (2006). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

KALBE BISNIS
Jurnal Bisnis dan Komunikasi